

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS, 2016). Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tingkat kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dapat di terima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk,

antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Adapun menurut ulama tafsir yakni Ibnu Katsir, melalui penafsirannya Qs. an-Nisā ayat 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”(Qs. an-Nisā ayat 36).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, Orang miskin itu adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan (Katsir, 2004). Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratanya (Katsir, 1998).

Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1), mengatakan bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan desa (Bandes). Tetapi upaya-upaya ini mengalami tahap kejenuhan pada pertengahan 1980-an, yang juga berarti upaya untuk mengurangi kemiskinan pada 1970-an tidak optimal, sehingga jumlah orang miskin di awal 1990-an naik lagi. Selain itu, tren ketimpangan pendapatan melebar, yang mencakup ketimpangan antar sektor, antar kelompok, dan regional.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Soegijoko, (1997:137). Dengan kata lain yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar dan ini menjadi hal yang sulit untuk menghindari hal kemiskinan tersebut. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bisa saja berupa soal pengangguran dan ketimpangan sosial yang sangat mendasar di negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk miskin yang banyak berdomisili di pedesaan. Selain itu, masih banyak hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan, seperti ketidakberdayaan, kekurangan kapasitas diri, krisis modal sosial dan lainnya dengan menimbulkan masalah-masalah yang tidak sebatas permasalahan ekonomi saja, sehingga setiap lapisan masyarakat mempunyai peran sebagai upaya bersama mengurangi kemiskinan

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Miskin menurut Pulau di Indonesia  
Tahun 2015-2018

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			
	2015	2016	2017	2018
Sumatera	6309.05	6214.86	5969.11	5919.3
Jawa	15312.3	14832.8	13936.46	13190.22
Bali dan Nusa Tenggara	2181.61	2111.6	2059.34	2038.07
Kalimantan	993.72	970.21	988.48	973.17
Sulawesi	2192.74	2088.19	2107.63	2025.16
Maluku dan Papua	1524.18	1546.66	1521.98	1528.66
<b>Indonesia</b>	<b>28513.57</b>	<b>27764.32</b>	<b>26582.99</b>	<b>25674.58</b>
<b>Presentase (%)</b>	<b>11,22</b>	<b>10,86</b>	<b>10,64</b>	<b>9,82</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Dari Tabel 1.1, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebesar 28513.57 ribu jiwa dengan presentase 11,22% dari jumlah penduduk di Indonesia, di tahun 2016 sampai 2018 menurun setiap tahunnya, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin 27764.32 dengan presentase 10,64%, tahun 2017 sebesar 26582.99 dengan presentase 10,64% dan tahun 2018 menurun hingga 25674.58 ribu jiwa dengan presentase 9,82% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Kemiskinan juga dapat dikatakan apabila orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menyebabkan kurangnya pendapatan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari bagaimana cara meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang pada akhirnya akan berdampak pada

peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri, masalah pendidikan, tingkat kesehatan, laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah tersebut karena semua itu mempengaruhi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting.

PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu wilayah/region pada satu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktu perekonomian di suatu daerah.

**Tabel 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**menurut Pulau di Indonesia Tahun 2015-2018**

Pulau	PDRB (Miliar Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
Sumatra	1,961,111,673.43	2,044,983,564.46	2,132,755,419.29	2,229,523,882.19
Jawa	5,251,789,034.58	5,545,719,886.96	5,857,628,973.77	6,192,835,264.54
Bali Dan Nusa Tenggara	275,235,341.27	291,498,747.48	302,308,956.23	310,415,811.86
Kalimantan	792,092,941.32	807,895,654.43	842,967,732.24	875,935,542.47
Sulawesi	525,042,087.78	563,958,027.32	603,213,865.81	643,347,705.84
Maluku Dan Papua	227,897,591.29	244,777,120.66	256,749,963.85	274,697,966.97
<b>Indonesia</b>	<b>9.033.168.669,65</b>	<b>9.498.833.001,30</b>	<b>9.995.624.911,19</b>	<b>10.526.756.173,88</b>
<b>Laju pertumbuhan (%)</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>5,23</b>	<b>5,31</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Dari Tabel 1.2, menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di negara Indonesia pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan yang stabil. PDRB tahun 2015 sebesar Rp.9.033.168.669,65 dengan laju pertumbuhan 5,16% , pada tahun 2016 PDRB sebesar Rp.9.498.833.001,30 dengan laju pertumbuhan sama seperti tahun 2015 yaitu 5,16% , tahun 2017 sebesar Rp.9.995.624.911,19 dengan laju pertumbuhan 5,23% dan 2018 naik hingga Rp.10.526.756.173,88 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,31%.

Selain PDRB, Penanaman Modal Asing (PMA) juga sebagai faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, PMA memiliki peran yang cukup besar dalam melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri yang akan meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara atau daerah. PMA dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan produk domestik (Jufriada, 2016). Penanaman modal asing langsung sangat membantu Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Peningkatan investasi melalui peningkatan barang modal dapat memberikan dampak terhadap perekonomian. PMA merupakan suatu investasi jangka panjang bagi Negara yang sedang berkembang. Kedatangan penanaman modal asing (PMA) dapat membantu pembangunan ekonomi, dalam hal pembangunan modal, menciptakan lapangan pekerjaan dan dengan adanya PMA maka meningkatkan produksi di Negara. Investasi merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika bertambahnya kapasitas pendapatan nasional maka kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa juga semakin bertambah (Dewi, 2015).

**Tabel 1.3**  
 Penanaman Modal Asing menurut Povinsi di Indonesia  
 Tahun 2015-2018

Provinsi	PMA (ribu US Dollar)			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	21.200.000	134.500.000	23.200.000	71.200.000
Sumatera Utara	1.246.100.000	1.014.700.000	1.514.900.000	1.227.600.000
Sumatera Barat	57.100.000	79.300.000	194.400.000	180.800.000
Riau	653.400.000	869.100.000	1.061.100.000	1.032.900.000
Jambi	107.700.000	61.000.000	76.800.000	101.900.000
Sumatera Selatan	645.800.000	2.793.500.000	1.182.900.000	1.078.600.000
Bengkulu	20.600.000	55.700.000	138.700.000	136.600.000
Lampung	257.700.000	85.700.000	120.600.000	132.300.000
Kep. Bangka Belitung	82.700.000	52.700.000	153.100.000	46.300.000
Kep. Riau	640.400.000	519.100.000	1.031.500.000	831.300.000
DKI Jakarta	3.619.400.000	3.398.200.000	4.595.000.000	4.857.700.000
Jawa Barat	5.738.700.000	5.470.900.000	5.142.900.000	5.573.500.000
Jawa Tengah	850.400.000	1.030.800.000	2.372.500.000	2.372.700.000
DI Yogyakarta	89.100.000	19.600.000	36.500.000	81.300.000

Provinsi	PMA (ribu US Dollar)			
	2015	2016	2017	2018
Jawa Timur	2.593.400.000	1.941.000.000	1.566.700.000	1.333.400.000
Banten	2.542.000.000	2.912.100.000	3.047.500.000	2.827.300.000
Bali	495.800.000	450.600.000	886.900.000	1.002.500.000
Nusa Tenggara Barat	699.400.000	439.000.000	132.100.000	251.600.000
Nusa Tenggara Timur	69.900.000	58.200.000	139.000.000	100.400.000
Kalimantan Barat	1.335.700.000	630.700.000	568.400.000	491.900.000
Kalimantan Tengah	933.600.000	408.200.000	641.000.000	678.500.000
Kalimantan Selatan	961.200.000	249.400.000	243.800.000	129.200.000
Kalimantan Timur	2.381.400.000	1.139.600.000	1.285.200.000	587.500.000
Kalimantan Utara	230.900.000	160.800.000	149.000.000	67.300.000
Sulawesi Utara	88.000.000	382.800.000	482.900.000	295.900.000
Sulawesi Tengah	1.085.200.000	1.600.300.000	1.545.600.000	672.400.000
Sulawesi Selatan	233.300.000	372.500.000	712.800.000	617.200.000
Sulawesi Tenggara	145.000.000	376.100.000	693.000.000	672.900.000
Gorontalo	6.900.000	12.700.000	41.300.000	40.800.000
Sulawesi Barat	2.000.000	20.600.000	11.400.000	24.700.000
Maluku	82.400.000	102.600.000	212.000.000	8.000.000
Maluku Utara	203.800.000	438.900.000	228.100.000	362.800.000
Papua Barat	258.600.000	514.500.000	84.700.000	286.900.000
Papua	897.000.000	1.168.400.000	1.924.100.000	1.132.300.000
<b>Indonesia</b>	29.275.900.000	28.964.100.000	32.239.800.000	29.307.900.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.3, menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing dari tahun 2015 sampai 2018, dengan Penanaman Modal Asing tahun 2015 sebesar 29.275.900.000 US dollar, di tahun 2016 mengalami penurunan dan sampai 2017 mengalami kenaikan lagi, pada tahun 2016 Penanaman Modal Asing sebesar

28.964.100.000 US dollar, tahun 2017 sebesar 32.239.800.000 US dollar dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 29.307.900.000. Jadi Penanaman Modal Asing di negara Indonesia pada tahun 2015-2018 tidak stabil.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran, salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Menurut Sadono Sukirno (2010), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

**Tabel 1.4**  
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsidi Indonesia  
Tahun 2015-2018

Provinsi	TPT (Persentase)			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	9.93	7.57	6.57	6.36
Sumatera Utara	6.71	5.84	5.60	5.56
Sumatera Barat	6.89	5.09	5.58	5.55
Riau	7.83	7.43	6.22	6.20
Jambi	4.34	4.00	3.87	3.86
Sumatera Selatan	6.07	4.31	4.39	4.23
Bengkulu	4.91	3.30	3.74	3.51
Lampung	5.14	4.62	4.33	4.06
Kep. Bangka Belitung	6.29	2.60	3.78	3.65
Kep. Riau	6.20	7.69	7.16	7.12
DKI Jakarta	7.23	6.12	7.14	6.24
Jawa Barat	8.72	8.89	8.22	8.17
Jawa Tengah	4.99	4.63	4.57	4.51
DI Yogyakarta	4.07	2.72	3.02	3.35
Jawa Timur	4.47	4.21	4.00	3.99
Banten	9.55	8.92	9.28	8.52
Bali	1.99	1.89	1.48	1.37
Nusa Tenggara Barat	5.69	3.94	3.32	3.72
Nusa Tenggara Timur	3.83	3.25	3.27	3.01
Kalimantan Barat	5.15	4.23	4.36	4.26
Kalimantan Tengah	4.54	4.82	4.23	4.01
Kalimantan Selatan	4.92	5.45	4.77	4.50
Kalimantan Timur	7.50	7.95	6.91	6.60
Kalimantan Utara	5.68	5.23	5.54	5.22
Sulawesi Utara	9.03	6.18	7.18	6.86
Sulawesi Tengah	4.10	3.29	3.81	3.43
Sulawesi Selatan	5.95	4.80	5.61	5.34
Sulawesi Tenggara	5.55	2.72	3.30	3.26
Gorontalo	4.65	2.76	4.28	4.03
Sulawesi Barat	3.35	3.33	3.21	3.16
Maluku	9.93	7.05	9.29	7.27
Maluku Utara	6.05	4.01	5.33	4.77
Papua Barat	8.08	7.46	6.49	6.30
Papua	3.99	3.35	3.62	3.20
<b>Indonesia</b>	<b>6.18</b>	<b>5.61</b>	<b>5.5</b>	<b>5.34</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.4, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2015 sampai 2018, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2015

sebesar 6.18 persen, di tahun 2016 sampai 2018 menurun setiap tahunnya, pada tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka 5.61 persen, tahun 2017 sebesar 5.5 persen dan tahun 2018 menurun hingga 5.34 persen. Jadi tingkat pengangguran terbuka di negara Indonesia pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan yang stabil.

Penelitian-penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan oleh beragam peneliti dari Indonesia bahkan di luar negeri karena bahasan tentang kemiskinan merupakan suatu masalah bagi setiap negara. Ketiga variabel di atas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya yang diteliti oleh Saputra dan Mudakir (2011) yang menggunakan variabel PDRB. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan hubungan variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel lainya seperti pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah.

Dan juga variabel PMA telah diteliti oleh Hanifah Safitri dan Muhammad Saleh (2020). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan hubungan variabel Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan, belanja non modal berpengaruh positif dan tidak signifikan, PMA berpengaruh negatif dan signifikan, dan PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Dan variabel TPT telah diteliti oleh Andykha, dkk (2018). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan hubungan variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel lainya seperti PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, TPT, dan PMA Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah di bahas di atas, dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PMA terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesiapada periode tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2015-2018?
3. Bagaimana pengaruh TPT terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2015-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar variabel PMA terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar variabel PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar variabel TPT terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Sebagai bahan informasi tambahan tentang pengaruh PMA, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2015-2018.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian ruang lingkup yang sama.
3. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca yang lain.